

**TRANSFORMASI PENYIARAN DIGITAL URGENSI HARMONISASI
REGULASI DALAM ERA MEDIA KONVERGEN STUDI DI
KABUPATEN TANAH KARO**

Zulham¹, Hasan Sazali²

zulham4004233004@uinsu.ac.id, hasansazali@uinsu.ac.id

Abstract

The transformation to digital broadcasting is a necessity in the context of convergent media, which continues to evolve. This shift not only has a significant impact on broadcasting technology but also requires regulatory harmonization to ensure that digital broadcasting can be implemented effectively and sustainably. This study aims to analyze the importance of regulatory harmonization in the context of digital broadcasting transformation in Tanah Karo Regency. The research employs a qualitative approach through case studies, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal several challenges in implementing digital broadcasting, such as differences in regulatory interpretation, lack of digital infrastructure, and the need to enhance human resource capacity. Therefore, regulatory harmonization is crucial to create a consistent framework, foster innovation, and ensure digital inclusion for all segments of society. This study recommends that local governments collaborate with relevant stakeholders to formulate adaptive and inclusive regulations. In addition, efforts in public education and training for both the community and industry players are essential to maximize the potential of digital broadcasting in the era of media convergence.

Keywords : Digital Broadcasting, Regulatory Harmonization Urgency, Convergent Media

A. PENDAHULUAN

Peralihan dari penyiaran analog ke digital merupakan sebuah fenomena yang terjadi secara global dan membawa dampak besar terhadap dunia media. Di Indonesia, transisi ini ditandai dengan pergeseran dari sistem siaran analog menuju digital, yang tidak hanya meningkatkan kualitas siaran tetapi juga

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Proses ini mencerminkan kemajuan teknologi yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih baik. Dengan adanya transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal regulasi. Dalam konteks konvergensi media yang semakin berkembang, di mana batasan antara berbagai platform media menjadi semakin tidak jelas, diperlukan adanya harmonisasi regulasi yang efektif.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam industri penyiaran dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cukup penting bagi pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung transisi ini. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terintegrasi, diharapkan proses peralihan ke penyiaran digital dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Transformasi ini bukan hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas informasi dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.³

Konvergensi media merujuk pada integrasi berbagai jenis media ke dalam satu platform digital yang terpadu.⁴ Dengan adanya konvergensi ini, konten yang sama dapat diakses melalui berbagai saluran seperti televisi, radio, internet, dan perangkat mobile. Jenkins menekankan bahwa konvergensi media tidak hanya melibatkan penggabungan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam praktik komunikasi dan cara masyarakat mendapatkan informasi.⁵

Di Indonesia fenomena konvergensi media ini memicu lembaga penyiaran untuk melakukan penyesuaian agar tetap dapat bersaing dan relevan di tengah

³ Daeho Kim, *Media Governance in Korea 1980 – 2017* (London: PALGRAVE MACMILLAN, 2018).

⁴ Samuel C. Rhodes, 'Filter Bubbles, Echo Chambers, and Fake News: How Social Media Conditions Individuals to Be Less Critical of Political Misinformation', *Political Communication*, 39.1 (2022), 1–22 <<https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1910887>>.

⁵ Henry Jenkins, *Convergence Culture Where Old and New Media Collide, Convergence Culture* (New York and London: New York University Press, 2006) <<https://doi.org/10.18574/nyu/9780814743683.003.0004>>.

dinamika industri yang terus berubah.⁶ Adaptasi ini mencakup pengembangan konten yang dapat diakses di berbagai platform serta pemanfaatan teknologi baru untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan demikian konvergensi media menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga penyiaran di Indonesia.⁷ Mereka dituntut untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang semakin beragam.

Konvergensi media menghadirkan sejumlah tantangan yang signifikan, termasuk perubahan dalam perilaku audiens, kemunculan aktor baru dalam ekosistem media, serta kebutuhan untuk mengembangkan model bisnis yang lebih fleksibel. Kehadiran platform-platform media digital, seperti Netflix dan Disney+, telah berkontribusi pada transformasi yang mendalam dalam industri televisi.⁸ Dengan demikian, penting untuk menganalisis konvergensi media guna memahami dampak dari platform-platform ini terhadap cara konsumen mengakses dan menikmati konten audiovisual. Perubahan perilaku audiens menjadi salah satu aspek yang paling mencolok akibat konvergensi media.

Audiens kini lebih memilih untuk mengonsumsi konten secara on-demand, yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan waktu dan cara menonton sesuai dengan preferensi pribadi. Hal ini menuntut para penyedia konten untuk beradaptasi dan menciptakan strategi yang lebih inovatif agar tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, munculnya pemain baru dalam ekosistem media menuntut adanya model bisnis yang adaptif. Perusahaan-perusahaan media tradisional harus mempertimbangkan cara-cara baru untuk menarik perhatian audiens dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Dengan

⁶ I Putu Juni Antara, 'Tantangan Regulasi Penyiaran Indonesia Di Era Digital_Konvergensi Regulasi Dalam Ruang Publik Digital', *Studio Magister MKP UGM*, 2024.

⁷ Ross Tapsell, 'Platform Convergence in Indonesia: Challenges and Opportunities for Media Freedom', *Convergence*, 21.2 (2015), 182–97 <<https://doi.org/10.1177/1354856514531527>>.

⁸ Muhammad Ikhwan Amar, Abrar Mpandi, and Rabiahtul Adawiah, 'TRANSFORMASI MEDIA ANALOG KE MEDIA DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI (ANALISIS KONVERGENSI MEDIA)', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8.7 (2024), 379–88.

menganalisis konvergensi media, kita dapat lebih memahami dinamika yang terjadi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi industri serta perilaku konsumen dalam mengakses konten audiovisual.

Kemajuan yang cepat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi memerlukan adanya regulasi yang fleksibel dan responsif. Di Indonesia, pengaturan mengenai berbagai bentuk media, termasuk penyiaran, pers, perfilman, dan media sosial, masih menunjukkan kurangnya integrasi yang memadai. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,⁹ yang seharusnya menjadi dasar bagi proses digitalisasi media, masih dalam tahap revisi hingga saat ini. Situasi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh regulasi di Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketidakmampuan regulasi untuk beradaptasi dengan cepat dapat mengakibatkan kesenjangan antara inovasi teknologi dan kerangka hukum yang ada. Hal ini berpotensi menghambat kemajuan dan pengembangan media yang seharusnya dapat memanfaatkan kemajuan digital. Penting bagi pembuat kebijakan untuk segera melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap regulasi yang ada agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan media di era digital. Integrasi yang lebih baik antara berbagai jenis media dan regulasi yang adaptif akan membantu memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Pentingnya harmonisasi regulasi dalam konteks media tidak dapat diabaikan, karena hal ini menjamin bahwa semua jenis platform media, baik yang bersifat tradisional maupun digital,¹⁰ beroperasi dalam kerangka hukum yang

⁹ Presiden Republik Indonesia, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARA', *Oxford University Press* (Indonesia, 2002), p. 649.

¹⁰ Alya Rahmayani Siregar, Azrai Harahap, and Mahardhika Sastra Nasution, 'Etika Komunikasi Media Digital Di Era Post-Truth', *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5.1 (2024), 39–53.

terdefinisi dengan baik. Regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan bahwa konten yang disajikan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam menghadapi era konvergensi media yang telah mengubah cara informasi disampaikan secara drastis, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyadari perlunya penyesuaian dalam regulasi penyiaran.¹¹

Oleh karena itu KPI berkomitmen untuk merumuskan aturan baru yang lebih jelas dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di dunia media saat ini. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan penyiaran yang lebih baik dan lebih teratur.¹² Dengan adanya regulasi yang harmonis, diharapkan semua platform media dapat beroperasi dengan lebih efektif dan bertanggung jawab. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas konten yang disiarkan, tetapi juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai konsumen informasi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Kabupaten Tanah Karo, yang terletak di provinsi Sumatera Utara, mengalami dampak yang signifikan akibat transformasi menuju penyiaran digital.¹³ Lembaga penyiaran di wilayah ini diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perubahan dalam perilaku audiens yang semakin dinamis. Hal ini menuntut lembaga penyiaran untuk lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), perubahan yang terjadi dalam ekosistem penyiaran digital memberikan peluang yang sangat besar bagi lembaga penyiaran lokal untuk berkembang.

Dengan adanya konvergensi media, lembaga penyiaran di Kabupaten Tanah Karo dapat memanfaatkan berbagai platform untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas siaran

¹¹ RG, 'Era Konvergensi Media Dan Instrumen Regulasi Penguatan KPI', *Komisi Penyiaran Indonesia*, 2020, p. 1.

¹² IRA, 'Penyiaran Di Daerah Harus Ambil Peluang Lewat Konvergensi Media', *Komisi Penyiaran Indonesia*, 2020.

¹³ Amar, Mpandi, and Adawiah.

dan memperkuat posisi lembaga penyiaran di tengah persaingan yang semakin ketat. Adaptasi terhadap penyiaran digital bukan hanya sekadar tuntutan, tetapi juga merupakan langkah strategis bagi lembaga penyiaran di Tanah Karo untuk tetap relevan.¹⁴ Dengan memanfaatkan teknologi baru dan memahami perilaku audiens, lembaga penyiaran dapat menciptakan konten yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi ini harus dilihat sebagai peluang untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing di era digital. Tanpa adanya regulasi yang terintegrasi, proses adaptasi terhadap penyiaran digital dapat menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan mengenai lisensi penyiaran digital, persaingan yang tidak sehat dengan platform digital internasional, serta kesulitan dalam menghasilkan konten lokal yang berkualitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kerangka regulasi yang jelas dan menyeluruh guna mendukung transformasi ini.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, memberikan ilustrasi yang jelas mengenai pentingnya harmonisasi regulasi dalam proses transformasi penyiaran digital. Fokus dari studi ini adalah untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi di tengah era media konvergen, serta dampak dari transformasi penyiaran digital terhadap kerangka regulasi yang sudah ada. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya harmonisasi regulasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan demikian, kerangka regulasi yang terintegrasi dapat mendukung perkembangan penyiaran digital yang lebih baik, serta mendorong produksi konten lokal yang berkualitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan penyiaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika media saat ini.

¹⁴ Muh Ichsan and others, 'Analisis Konvergensi Media: Studi Transformasi Dari Media Analog Ke Media Digital', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4.4 (2024), 19–30.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi pustaka dan analisis dokumen.¹⁵ Sumber data yang digunakan mencakup berbagai referensi, seperti jurnal akademik, laporan dari industri, dokumen kebijakan, serta literatur lain yang berkaitan dengan isu transformasi penyiaran digital dan regulasi media konvergen. Proses penelitian terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dengan pengumpulan data baik primer maupun sekunder dari sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi.¹⁶ Selanjutnya, dilakukan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan harmonisasi regulasi serta transformasi dalam penyiaran digital. Tahap terakhir kesimpulan disusun berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh selama proses penelitian.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika regulasi dan perkembangan penyiaran digital di era konvergensi media.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Penyiaran Digital

Transformasi penyiaran digital merujuk pada pergeseran dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran yang berbasis digital.¹⁸ Proses ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengirimkan sinyal audio dan video, yang memungkinkan peningkatan kualitas gambar dan suara. Selain itu, penyiaran digital juga menawarkan berbagai layanan tambahan, seperti interaktivitas dan akses ke konten yang lebih beragam, yang tidak dapat dicapai

¹⁵ Johnny Saldana Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Sustainability (Switzerland)* (London and New York: Sage Publications, 2014), xi.

¹⁶ John W. Creswell, *Research Design* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>.

¹⁷ Harry T. Reis and Charles M. Judd, *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY, Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), vii.

¹⁸ Tanja Storsul & Arne H. Krumsvik, *Media Innovations A Multidisciplinary Study of Change* (Sweden: Nordicom University of Gothenburg, 2013), 1 <<https://doi.org/10.13140/2.1.1328.9284>>.

dengan sistem analog. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara konten disampaikan, tetapi juga pada cara konsumen mengakses informasi.

Dengan adanya penyiaran digital, pemirsa kini dapat menikmati tayangan dengan lebih fleksibel, termasuk kemampuan untuk menonton program sesuai permintaan.¹⁹ Hal ini menciptakan pengalaman yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi individu, yang pada gilirannya mendorong inovasi dalam industri media. Di sisi lain, transformasi ini juga menuntut adaptasi dari berbagai pihak, termasuk penyedia layanan, pembuat konten, dan pemirsa itu sendiri. Penyiaran digital memerlukan infrastruktur yang lebih canggih dan investasi yang signifikan dalam teknologi baru. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini agar dapat memanfaatkan potensi penuh dari penyiaran digital.

Transformasi penyiaran digital adalah sebuah fenomena yang bersifat global dan berpotensi mengubah struktur industri media secara signifikan.²⁰ Di Indonesia, pergeseran dari sistem penyiaran analog menuju digital telah menjadi salah satu agenda utama dalam rangka meningkatkan mutu siaran, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, serta memperkaya variasi konten yang tersedia. Kabupaten Tanah Karo, sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam transisi ini, memberikan contoh yang menarik untuk menganalisis dampak dan tantangan yang muncul akibat perubahan tersebut.

Proses peralihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan. Dengan adanya penyiaran digital, diharapkan masyarakat dapat menikmati siaran yang lebih berkualitas dan beragam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses

¹⁹ Avian Yuliar Pranantha, Dadang Rahmat Hidayat, and Teddy Kurnia Wirakusumah, 'Transformation of Local Print Media in the Era of Disruption to Maintain Business Continuity', *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2.12 (2023), 1496–1510 <<https://doi.org/10.57096/edunity.v2i12.205>>.

²⁰ Vidi Sukmayadi, 'The Dynamics of Media Landscape and Media Policy in Indonesia', *Asia Pacific Media Educator*, 29.1 (2019), 58–67 <<https://doi.org/10.1177/1326365X19844853>>.

informasi.²¹ Namun, tantangan dalam implementasi teknologi baru ini, seperti infrastruktur yang belum memadai dan kesenjangan digital, menjadi isu penting yang harus diatasi agar transformasi ini dapat berjalan dengan sukses. Dalam konteks Kabupaten Tanah Karo, studi kasus ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari transformasi penyiaran digital ini, serta untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang proses ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan industri media di Indonesia.

Penyiaran digital adalah transisi dari teknologi analog menuju teknologi digital dalam konteks penyiaran radio dan televisi.²² Transformasi ini memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan kualitas gambar dan suara, efisiensi dalam penggunaan spektrum frekuensi, serta kesempatan untuk menawarkan layanan tambahan yang bersifat interaktif dan mendukung mobilitas. Dengan beralih ke penyiaran digital, pengguna dapat menikmati pengalaman menonton dan mendengarkan yang lebih superior.

Kualitas sinyal yang lebih baik memungkinkan pemirsa dan pendengar untuk merasakan detail yang lebih halus dalam konten yang disajikan.²³ Selain itu, penyiaran digital juga memungkinkan penyedia layanan untuk memanfaatkan spektrum frekuensi secara lebih optimal, sehingga meningkatkan kapasitas dan jangkauan siaran. Lebih jauh lagi, penyiaran digital membuka peluang untuk

²¹ Sutrisno Sutrisno, 'Changes in Media Consumption Patterns and Their Implications for People's Cultural Identity', *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1.1 (2023), 18–25 <<https://doi.org/10.61100/tacit.v1i1.31>>.

²² Novrian Novrian and others, 'Public Relations and Digital Media', *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 3.2 (2023), 235–49 <<https://doi.org/10.55606/juitik.v3i2.590>>.

²³ Ayu Rahmawati and Firman Kurniawan Sujono, 'Digital Communication through Online Learning in Indonesia: Challenges and Opportunities', *Jurnal ASPIKOM*, 6.1 (2021), 61 <<https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i1.815>>.

pengembangan layanan baru yang dapat meningkatkan interaksi antara penyiar dan audiens. Fitur-fitur seperti pemrograman interaktif dan aksesibilitas di berbagai perangkat mobile menjadi semakin mungkin, memberikan pengalaman yang lebih kaya dan dinamis bagi pengguna. Dengan demikian, transisi ini tidak hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas dan variasi layanan penyiaran.

Penyiaran digital memberikan keunggulan dalam hal kualitas, di mana gambar dan suara yang dihasilkan jauh lebih jelas dan tajam dibandingkan dengan siaran analog.²⁴ Hal ini berkontribusi pada pengalaman menonton yang lebih memuaskan bagi pemirsa, karena detail visual dan audio yang lebih baik dapat dinikmati. Teknologi digital juga meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Dengan demikian lebih banyak saluran siaran dapat dihadirkan, yang memungkinkan variasi konten yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan beragam audiens. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya frekuensi. Penyiaran digital juga menawarkan fleksibilitas dalam hal konten yang disiarkan, termasuk kemampuan untuk menyajikan layanan interaktif dan informasi tambahan. Selain itu, dukungan untuk perangkat portabel memungkinkan pemirsa untuk mengakses siaran kapan saja dan di mana saja, meningkatkan mobilitas dalam menikmati konten media.

Era Media Konvergen

Era media konvergen merujuk pada periode di mana berbagai bentuk media, seperti televisi, radio, dan internet, mulai berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.²⁵ Dalam konteks ini, teknologi digital memainkan peran penting dalam mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Proses konvergensi ini tidak hanya menciptakan peluang baru bagi para pembuat konten, tetapi juga menantang batasan tradisional yang ada dalam

²⁴ Manuel Puppis, 'Media Regulation in Small States', *International Communication Gazette*, 71.1–2 (2009), 7–17 <<https://doi.org/10.1177/1748048508097927>>.

²⁵ Kresnawidiansyah Agustian and others, 'The Impact of Digital Transformation on Business Models and Competitive Advantage', *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1.2 (2023), 79–93 <<https://doi.org/10.61100/tacit.v1i2.55>>.

industri media. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan integrasi berbagai platform media, sehingga audiens dapat mengakses konten dari berbagai sumber dengan lebih mudah. Hal ini juga mendorong terciptanya pengalaman media yang lebih interaktif, di mana pengguna tidak hanya sebagai konsumen pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses produksi dan distribusi konten.

Dengan demikian era media konvergen menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara media dan masyarakat.²⁶ Selain itu, era ini juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan isu hak cipta, privasi, dan kualitas informasi. Dengan banyaknya sumber informasi yang tersedia, audiens dihadapkan pada kesulitan dalam menentukan mana yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengembangkan keterampilan literasi media yang baik agar dapat menavigasi lanskap media yang semakin kompleks ini. Era media konvergen, dengan segala peluang dan tantangannya, menjadi titik balik yang signifikan dalam evolusi komunikasi dan informasi di masyarakat modern.

Konvergensi media dapat dipahami sebagai proses penggabungan berbagai platform dan teknologi yang memungkinkan distribusi serta akses konten melalui beragam perangkat dan saluran.²⁷ Proses ini menimbulkan tantangan baru dalam hal regulasi, karena peraturan yang sebelumnya diterapkan pada penyiaran konvensional mungkin tidak lagi relevan atau cukup fleksibel untuk mengatasi dinamika yang muncul akibat konvergensi ini. Media konvergen merujuk pada integrasi berbagai bentuk media yang terjadi melalui platform digital. Fenomena ini ditandai dengan munculnya platform *over-the-top* (OTT) yang mengkombinasikan konten dari televisi, radio, dan internet dalam satu kesatuan.

²⁶ Hermin Indah Wahyuni and others, 'Technology, Transparency, and Collaboration/Integration: Analysis of Digital Government Problems from Public Communication Perspective during the COVID-19 Pandemic in Indonesia', *Information Polity*, 29.1 (2024), 93–111 <<https://doi.org/10.3233/IP-211545>>.

²⁷ Husnul Ma'rifah Rossatul Nurliza, Eko Purwanto, Tantry Widiyanarti, Sopian, Hana Asilah Mumtaz, Berliyanti Sapitri, Novi Puspita Sari, 'Analysis Of The Influence Of Media On Cultural Change In The Digital Age', *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 45.1 (2024), 29–35.

Konvergensi media ini menciptakan sebuah ekosistem baru yang tidak hanya menantang model bisnis yang sudah ada, tetapi juga memerlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan responsif.²⁸ Dengan adanya konvergensi media tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan semakin kompleks. Mereka perlu merumuskan regulasi yang dapat mengakomodasi perubahan cepat dalam cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perilaku konsumen yang terus berubah.

Tantangan yang dihadapi oleh media konvergen sangat kompleks, terutama ketika media tradisional harus berhadapan dengan berbagai platform digital yang menyediakan konten sesuai permintaan.²⁹ Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada konsumsi media secara daring menuntut media tradisional untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif. Dalam konteks monetisasi industri media dihadapkan pada tantangan untuk menemukan model bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan secara efektif.

Dengan banyaknya pilihan yang tersedia bagi konsumen, media harus menciptakan strategi yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain dari itu terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis yang terus berubah. Regulasi yang adaptif sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku industri dapat beroperasi secara adil dan berkelanjutan, serta untuk melindungi kepentingan konsumen di era digital ini.

²⁸ Meriko Dian Candra Iwana and others, 'The Effects of Internet on Rural-to-Urban Migrating Intentions of Young Villagers: Evidence from Rural Indonesia', *Agraris*, 8.2 (2022), 139–59 <<https://doi.org/10.18196/agraris.v8i2.14045>>.

²⁹ Sella Ellissa Devita Sari, Mutiara Wikant Saphira, and Theodore Sibarani, 'Legal Aspects of Consumer Protection in E-Commerce Transactions: Implementation and Urgency of Regulations in the Digitalization Era', *JUSTICES: Journal of Law*, 3.2 (2024), 86–110 <<https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.105>>.

Urgensi Harmonisasi Regulasi

Pentingnya harmonisasi regulasi dalam konteks hukum dan kebijakan publik tidak dapat diabaikan.³⁰ Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara berbagai peraturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya harmonisasi, diharapkan akan tercipta kepastian hukum yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selain itu, harmonisasi regulasi juga berperan dalam meminimalisir konflik hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi atau penerapan peraturan yang tidak konsisten. Dalam menghadapi era globalisasi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menyusun regulasi semakin kompleks. Berbagai sektor, seperti perdagangan, lingkungan, dan kesehatan, memerlukan pendekatan yang terintegrasi agar dapat berfungsi secara efektif.

Harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga sejalan dengan standar internasional.³¹ Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing negara di pasar global dan untuk memenuhi komitmen internasional yang telah disepakati. Selain manfaat ekonomi harmonisasi regulasi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dengan adanya regulasi yang harmonis, masyarakat akan lebih mudah memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ini dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan mengurangi potensi pelanggaran. Di samping itu, harmonisasi regulasi juga dapat memperkuat kerjasama antarnegara, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan regional. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai harmonisasi regulasi harus menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik.

³⁰ Anisya Eka and Elisa Susanti, 'Digital Readiness in The Digitalization of Public Service in Mekarsari Village, Selaawi Sub-District, Garut District', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 21.1 (2024), 58–68 <<https://doi.org/10.31113/jia.v21i1.1122>>.

³¹ Aurelius Ratu and others, 'Understanding the Impact of Social Media and Socio-Demographic Variables on the Family Income in a Developing Society', September, 2020, 651–58 <<https://doi.org/10.5220/0009960406510658>>.

Dalam era transformasi digital dan konvergensi media, pentingnya harmonisasi regulasi semakin menonjol untuk membangun ekosistem yang sehat dan kompetitif.³² Regulasi yang terintegrasi dengan baik dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul serta memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat yang optimal dari proses transformasi ini. Harmonisasi regulasi tidak hanya berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan adanya regulasi yang selaras, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antara sektor-sektor yang terlibat dalam ekosistem digital, sehingga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Regulasi yang harmonis juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi dan media baru. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang memadai, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengadopsi inovasi yang ditawarkan, yang pada gilirannya akan mempercepat proses transformasi digital secara keseluruhan.

Aspek regulasi yang perlu diselaraskan mencakup pengaturan spektrum frekuensi yang adil dan efisien, yang bertujuan untuk mendukung penyiaran digital.³³ Pengelolaan spektrum frekuensi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa semua penyedia layanan dapat beroperasi secara optimal, sehingga meningkatkan kualitas penyiaran dan mengurangi interferensi antar saluran. Regulasi yang berkaitan dengan konten dan penyiaran harus mendukung keberagaman konten serta melindungi kepentingan publik. Hal ini mencakup perlunya kebijakan yang mendorong produksi konten lokal dan beragam, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya

³² M Hendri Agustiawan, Khoirul Umam, and Mohammad Maleka, 'The Importance of Consumer Protection Law Revision in the Development of E-Commerce in the Digital Transformation Era in Indonesia', *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1.2 SE-Articles (2022), 305–17.

³³ Tabassum Ruhi Khan, 'Digital Disconnect: How Capitalism Is Turning the Internet against Democracy, Written by Robert W. McChesney', *Asiascape: Digital Asia*, 2.3 (2015), 305–7 <<https://doi.org/10.1163/22142312-12340040>>.

akurat tetapi juga bermanfaat bagi kepentingan umum. Yang tidak kalah penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong persaingan yang sehat antara media tradisional dan platform digital, serta menetapkan aturan yang melindungi konsumen dari konten yang merugikan. Dengan demikian, diharapkan aksesibilitas terhadap informasi yang berkualitas dapat terjamin, dan konsumen dapat dilindungi dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari konten yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu alasan penting untuk melakukan harmonisasi regulasi adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.³⁴ Dengan adanya regulasi yang seragam, konsumen dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan dijamin aksesnya terhadap konten yang berkualitas. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna layanan. Harmonisasi regulasi juga berperan dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat di sektor penyiaran. Dengan adanya regulasi yang konsisten, baik perusahaan lama maupun pendatang baru dapat bersaing secara adil. Ini akan mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan yang pada akhirnya menguntungkan konsumen. Regulasi yang harmonis dan adaptif sangat penting untuk mendukung inovasi teknologi. Dengan adanya kerangka regulasi yang fleksibel, pengembangan teknologi baru dan layanan inovatif dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini tidak hanya akan memperkaya pilihan bagi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Studi Kasus di Kabupaten Tanah Karo

Kabupaten Tanah Karo menawarkan wawasan yang menarik mengenai pelaksanaan transformasi penyiaran digital di tingkat daerah. Penelitian ini menekankan berbagai elemen krusial, seperti kesiapan infrastruktur yang ada, tingkat penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini, serta dampak yang

³⁴ Eko Sumardi and Indah Suryawati, 'Indonesian Journalism in the Era of Information Disruption', *Propaganda*, 2.1 (2022), 15–31 <<https://doi.org/10.37010/prop.v2i1.446>>.

ditimbulkan dalam aspek sosial dan ekonomi.³⁵ Dalam kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi penyiaran digital. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung penyebaran teknologi baru dan memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap penyiaran digital juga berperan signifikan dalam proses ini. Dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dari transformasi ini dapat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan, informasi, dan hiburan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tanah Karo.

1. Kesiapan Infrastruktur

Kesiapan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mendukung berbagai kegiatan dan pembangunan di suatu wilayah. Infrastruktur yang baik dan memadai akan memfasilitasi mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta akses terhadap layanan publik.³⁶ Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan infrastruktur harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal. Dalam hal pembangunan ekonomi, infrastruktur yang siap pakai berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan.

Investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, tidak hanya meningkatkan konektivitas antar daerah, tetapi juga menarik minat investor untuk berinvestasi di suatu wilayah. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesiapan infrastruktur juga berkaitan dengan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur yang dirancang dengan baik harus mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, sehingga dapat

³⁵ Prasetyo Matak Aji, Vanessa Nadhila, and Lim Sanny, 'Effect of Social Media Marketing on Instagram towards Purchase Intention: Evidence from Indonesia's Ready-to-Drink Tea Industry', *International Journal of Data and Network Science*, 4.2 (2020), 91–104 <<https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2020.3.002>>.

³⁶ D Wilding and others, 'The Impact of Digital Platforms on News and Journalistic Content', *Centre for Media Transition*, 2018, 175.

meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan ketahanan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua.

Penyiaran digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat, yang mencakup stasiun pemancar digital serta perangkat penerima yang sesuai.³⁷ Di Kabupaten Tanah Karo terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan infrastruktur tersebut, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. Kondisi geografis dan demografis di Kabupaten Tanah Karo menjadi faktor yang mempengaruhi ketersediaan infrastruktur penyiaran digital. Daerah-daerah yang sulit dijangkau sering kali mengalami keterbatasan dalam akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk mendukung penyiaran digital yang efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan infrastruktur penyiaran digital di Kabupaten Tanah Karo harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat setempat. Hal ini penting agar semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati manfaat dari penyiaran digital secara merata.

2. Penerimaan Masyarakat

Penerimaan masyarakat merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok dalam suatu komunitas mengakui dan menerima keberadaan, ide, atau perubahan yang diperkenalkan. Proses ini sangat penting dalam konteks sosial, karena dapat mempengaruhi dinamika interaksi antaranggota masyarakat. Penerimaan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung kolaborasi, sedangkan penolakan dapat menimbulkan konflik dan ketegangan. Dalam konteks pembangunan sosial, penerimaan masyarakat sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan suatu program atau kebijakan.

³⁷ Mats Ekström and Oscar Westlund, 'The Dislocation of News Journalism: A Conceptual Framework for the Study of Epistemologies of Digital Journalism', *Media and Communication*, 7.1 Journalism and Social Media (2019), 259–70 <<https://doi.org/10.17645/mac.v7i1.1763>>.

Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih menerima perubahan yang diusulkan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan pendekatan yang inklusif dan transparan, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diakui. Selain penerimaan masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, dan tingkat pendidikan. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masyarakat setempat dapat membantu dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Dengan demikian, penerimaan masyarakat tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan, tetapi juga pada cara penyampaian dan konteks sosial yang ada.

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap penyiaran digital sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami keuntungan serta cara pemanfaatan teknologi yang baru ini.³⁸ Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya edukasi yang efektif agar masyarakat dapat mengapresiasi dan memanfaatkan penyiaran digital dengan baik. Kampanye yang bertujuan untuk mendidik dan mensosialisasikan informasi mengenai penyiaran digital menjadi faktor krusial dalam mendorong masyarakat untuk mengadopsi teknologi ini. Dengan memberikan pemahaman yang jelas, masyarakat diharapkan dapat melihat nilai tambah dari penyiaran digital dan berpartisipasi aktif dalam transisi ini. Pendekatan yang inklusif dalam sosialisasi teknologi penyiaran digital akan membantu mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Melalui program-program yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan adopsi penyiaran digital dapat meningkat secara signifikan.

3. Dampak Sosial-Ekonomi

Dampak sosial-ekonomi merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan, program, atau peristiwa terhadap struktur sosial dan kondisi

³⁸ STEPHEN J. A. WARD, *Ethics and the Media Second Edition Now* (London: Cambridge Applied Ethics Titles, 2016).

ekonomi masyarakat. Aspek sosial mencakup perubahan dalam interaksi antarindividu, norma, dan nilai yang berlaku dalam komunitas, sedangkan aspek ekonomi berhubungan dengan pengaruh terhadap pendapatan, lapangan kerja, dan distribusi sumber daya. Analisis terhadap dampak ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan tertentu dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal pembangunan dampak sosial-ekonomi sering kali menjadi indikator keberhasilan suatu inisiatif. Misalnya, program pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perubahan dalam kualitas hidup, akses terhadap pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Sehingga diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak sosial-ekonomi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas suatu program dan membantu dalam perencanaan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Cukup penting untuk mempertimbangkan bahwa dampak sosial-ekonomi dapat bervariasi antar kelompok masyarakat.

Faktor-faktor seperti latar belakang budaya, status sosial, dan lokasi geografis dapat memengaruhi bagaimana individu atau kelompok merasakan dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Transformasi digital dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses terhadap informasi, memperkuat sektor pendidikan, serta menciptakan peluang ekonomi yang baru melalui penyediaan konten lokal dan layanan berbasis digital.³⁹ Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber informasi yang sebelumnya sulit dijangkau.

³⁹ Soraj Hongladarom, 'Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power', *Ai & Society*, 38.6 (2023), 2359–61 <<https://doi.org/10.1007/s00146-020-01100-0>>.

Hal ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Selain dari transformasi digital juga berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan platform yang memungkinkan pengembangan konten lokal.

Layanan digital yang inovatif dapat membuka jalan bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal.

D. KESIMPULAN

Perubahan dalam penyiaran digital dan konvergensi media memerlukan adanya penyesuaian regulasi yang dapat mendukung pertumbuhan industri penyiaran dengan cara yang sehat dan inovatif. Kerjasama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk merumuskan kerangka regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanah Karo mengungkapkan bahwa kesiapan infrastruktur, tingkat penerimaan masyarakat, dan adanya regulasi yang adaptif menjadi faktor-faktor kunci dalam menghadapi tantangan era media konvergen.

Dengan adanya harmonisasi regulasi yang tepat, transformasi dalam industri media dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pelaku industri. Jika dilihat dari seberapa penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mampu memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam industri penyiaran. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan transformasi penyiaran digital dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, Kresnawidiansyah, Endang Saefuddin Mubarak, Agustian Zen, Wiwin Wiwin, and Aulia Januar Malik, 'The Impact of Digital Transformation on Business Models and Competitive Advantage', *Technology and Society*

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 7, No. 3, April – Juni 2025

- Perspectives (TACIT)*, 1.2 (2023), 79–93
<<https://doi.org/10.61100/tacit.v1i2.55>>
- Agustiawan, M Hendri, Khoirul Umam, and Mohammad Maleka, ‘The Importance of Consumer Protection Law Revision in the Development of E-Commerce in the Digital Transformation Era in Indonesia’, *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1.2 SE-Articles (2022), 305–17
- Aji, Prasetyo Matak, Vanessa Nadhila, and Lim Sanny, ‘Effect of Social Media Marketing on Instagram towards Purchase Intention: Evidence from Indonesia’s Ready-to-Drink Tea Industry’, *International Journal of Data and Network Science*, 4.2 (2020), 91–104
<<https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2020.3.002>>
- Amar, Muhammad Ikhwan, Abrar Mpandi, and Rabiahtul Adawiah, ‘TRANSFORMASI MEDIA ANALOG KE MEDIA DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI (ANALISIS KONVERGENSI MEDIA)’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8.7 (2024), 379–88
- Creswell, John W., *Research Design* (Los Angeles: Sage, 2009)
<<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>
- Eka, Anisya, and Elisa Susanti, ‘Digital Readiness in The Digitalization of Public Service in Mekarsari Village, Selaawi Sub-District, Garut District’, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 21.1 (2024), 58–68 <<https://doi.org/10.31113/jia.v21i1.1122>>
- Ekström, Mats, and Oscar Westlund, ‘The Dislocation of News Journalism: A Conceptual Framework for the Study of Epistemologies of Digital Journalism’, *Media and Communication*, 7.1 Journalism and Social Media (2019), 259–70 <<https://doi.org/10.17645/mac.v7i1.1763>>
- Hongladarom, Soraj, ‘Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power’, *Ai & Society*, 38.6 (2023), 2359–61 <<https://doi.org/10.1007/s00146-020-01100-0>>

- I Putu Juni Antara, 'Tantangan Regulasi Penyiaran Indonesia Di Era Digital_Konvergensi Regulasi Dalam Ruang Publik Digital', *Studio Magister MKP UGM*, 2024
- Ichsan, Muh, Rahma Hasnah, Muh Faiz, and Suryani Musi, 'Analisis Konvergensi Media: Studi Transformasi Dari Media Analog Ke Media Digital', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4.4 (2024), 19–30
- Indonesia, Presiden Republik, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARA', *Oxford University Press* (Indonesia, 2002), p. 649
- IRA, 'Penyiaran Di Daerah Harus Ambil Peluang Lewat Konvergensi Media', *Komisi Penyiaran Indonesia*, 2020
- Iwana, Meriko Dian Candra, A. R.Rohman Taufiq Hidayat, Dian Dinanti, and Kenichiro Onitsuka, 'The Effects of Internet on Rural-to-Urban Migrating Intentions of Young Villagers: Evidence from Rural Indonesia', *Agraris*, 8.2 (2022), 139–59 <<https://doi.org/10.18196/agraris.v8i2.14045>>
- Jenkins, Henry, *Convergence Culture Where Old and New Media Collide*, *Convergence Culture* (New York and London: New York University Press, 2006) <<https://doi.org/10.18574/nyu/9780814743683.003.0004>>
- Judd, Harry T. Reis and Charles M., *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), VII
- Khan, Tabassum Ruhi, 'Digital Disconnect: How Capitalism Is Turning the Internet against Democracy, Written by Robert W. McChesney', *Asiascape: Digital Asia*, 2.3 (2015), 305–7 <<https://doi.org/10.1163/22142312-12340040>>
- Kim, Daeho, *Media Governance in Korea 1980 – 2017* (London: PALGRAVE MACMILLAN, 2018)
- Krumsvik, Tanja Storsul & Arne H., *Media Innovations A Multidisciplinary Study of Change* (Sweden: Nordicom University of Gothenburg, 2013), I
- FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 7, No. 3, April – Juni 2025

<<https://doi.org/10.13140/2.1.1328.9284>>

Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Sustainability (Switzerland)* (London and New York: Sage Publications, 2014), XI

Novrian Novrian, Suroso Suroso, Mohamad Sudi, Muhsin Efendi, and Geofakta Razali, 'Public Relations and Digital Media', *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 3.2 (2023), 235–49
<<https://doi.org/10.55606/juitik.v3i2.590>>

Puppis, Manuel, 'Media Regulation in Small States', *International Communication Gazette*, 71.1–2 (2009), 7–17
<<https://doi.org/10.1177/1748048508097927>>

Rahmawati, Ayu, and Firman Kurniawan Sujono, 'Digital Communication through Online Learning in Indonesia: Challenges and Opportunities', *Jurnal ASPIKOM*, 6.1 (2021), 61 <<https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i1.815>>

Ratu, Aurelius, Edy Subali, . Marsudi, Banu Prasetyo, Arfan Fahmi, Siti Zahrok, and others, 'Understanding the Impact of Social Media and Socio-Demographic Variables on the Family Income in a Developing Society', September, 2020, 651–58 <<https://doi.org/10.5220/0009960406510658>>

RG, 'Era Konvergensi Media Dan Instrumen Regulasi Penguatan KPI', *Komisi Penyiaran Indonesia*, 2020, p. 1

Rhodes, Samuel C., 'Filter Bubbles, Echo Chambers, and Fake News: How Social Media Conditions Individuals to Be Less Critical of Political Misinformation', *Political Communication*, 39.1 (2022), 1–22
<<https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1910887>>

Rossatul Nurliza, Eko Purwanto, Tantry Widiyanarti, Sopian, Hana Asilah Mumtaz, Berliyanti Sapitri, Novi Puspita Sari, Husnul Ma'rifah, 'Analysis Of The Influence Of Media On Cultural Change In The Digital Age', *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 45.1 (2024), 29–35

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 7, No. 3, April – Juni 2025

- Sella Ellissa Devita Sari, Mutiara Wikant Saphira, and Theodore Sibarani, 'Legal Aspects of Consumer Protection in E-Commerce Transactions: Implementation and Urgency of Regulations in the Digitalization Era', *JUSTICES: Journal of Law*, 3.2 (2024), 86–110 <<https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.105>>
- Siregar, Alya Rahmayani, Azrai Harahap, and Mahardhika Sastra Nasution, 'Etika Komunikasi Media Digital Di Era Post-Truth', *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5.1 (2024), 39–53
- Sukmayadi, Vidi, 'The Dynamics of Media Landscape and Media Policy in Indonesia', *Asia Pacific Media Educator*, 29.1 (2019), 58–67 <<https://doi.org/10.1177/1326365X19844853>>
- Sumardi, Eko, and Indah Suryawati, 'Indonesian Journalism in the Era of Information Disruption', *Propaganda*, 2.1 (2022), 15–31 <<https://doi.org/10.37010/prop.v2i1.446>>
- Sutrisno, Sutrisno, 'Changes in Media Consumption Patterns and Their Implications for People's Cultural Identity', *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1.1 (2023), 18–25 <<https://doi.org/10.61100/tacit.v1i1.31>>
- Tapsell, Ross, 'Platform Convergence in Indonesia: Challenges and Opportunities for Media Freedom', *Convergence*, 21.2 (2015), 182–97 <<https://doi.org/10.1177/1354856514531527>>
- Wahyuni, Hermin Indah, Andi Awaluddin Fitrah, Deby Febriyan Eprilianto, and Ida Mardalena, 'Technology, Transparency, and Collaboration/Integration: Analysis of Digital Government Problems from Public Communication Perspective during the COVID-19 Pandemic in Indonesia', *Information Polity*, 29.1 (2024), 93–111 <<https://doi.org/10.3233/IP-211545>>
- WARD, STEPHEN J. A., *Ethics and the Media Second Edition Now* (London: Cambridge Applied Ethics Titles, 2016)
- Wilding, D, P Fray, S Molitorisz, and E Mckewon, 'The Impact of Digital
- FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 7, No. 3, April – Juni 2025

Platforms on News and Journalistic Content’, *Centre for Media Transition*, 2018, 175

Yuliar Pranantha, Avian, Dadang Rahmat Hidayat, and Teddy Kurnia Wirakusumah, ‘Transformation of Local Print Media in the Era of Disruption to Maintain Business Continuity’, *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2.12 (2023), 1496–1510
<<https://doi.org/10.57096/edunity.v2i12.205>>